



IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA TANPA KEMISKINAN DI DESA RANCAMULYA KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG

Risma Rismawati¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Judul skripsi dalam penelitian ini adalah “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 18 tujuan. Fenomena penelitian kurangnya penyebaran informasi dan komunikasi, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas staff dan pembagian tugas tidak jelas. Peneliti menggunakan teori Edward III untuk menentukan keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SDGs Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya dilihat dalam empat aspek. Aspek komunikasi, sosialisasi yang dilakukan satu kali sehingga kurang memahami SDGs Desa. Aspek Sumberdaya, rendahnya kualitas staff yang memiliki keahlian teknis dan anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan riil. Aspek Disposisi, sikap pelaksana yang belum tegas. Aspek Struktur Birokrasi, pelaksanaanya mengacu pada SOP yang ada namun tidak memahami bagaimana bentuk SOP nya serta adanya pembagian tugas yang tidak merata.

Kata Kunci : *Implementasi, Sustainable Development Goals, SDGs Desa, Kemiskinan*

Abstract

The title of the thesis in this research is “Implementation of Village Sustainable Development Goals (SDGs) to Create a Poverty-Free Village in Rancamulya Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency.” Village Sustainable Development Goals (SDGs) are sustainable development objectives consisting of 18 goals. The research phenomenon includes a lack of information dissemination and communication, limited budget, low staff quality, and unclear task distribution. The researcher uses Edward III's theory to determine the success of the implementation, influenced by four dimensions: communication, resources, disposition, and organizational structure. This

study aims to describe and analyze the Implementation of Village Sustainable Development Goals (SDGs) to Create a Poverty-Free Village in Rancamulya Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency. Qualitative descriptive research method. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research results show that the implementation of Village SDGs to realize a Poverty-Free Village in Rancamulya Village is seen from four aspects. Communication aspect: socialization was carried out only once, resulting in limited understanding of Village SDGs. Resource aspect: low quality of staff with technical expertise and available budget is insufficient to meet actual needs. Disposition aspect: implementers' attitudes are not firm. Bureaucratic Structure aspect: implementation refers to existing SOPs but there is a lack of understanding of the actual form of the SOPs and uneven distribution of tasks.

Keywords: *Implementation, Sustainable Development Goals, Village SDGs, Poverty*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah hasil dari penurunan kualitas hidup, menghambat pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, memicu adanya bantuan sosial ekonomi, meningkatkan tindakan kriminal dan mengurangi ketertiban di masyarakat. Menurut Solihin (2014), kemiskinan merupakan ketidakmampuan sekelompok masyarakat untuk berdaya dalam sistem yang ditetapkan pemerintah sehingga lemahnya posisi masyarakat dan rentan dieksploitasi. Kemiskinan merupakan kondisi yang terbatas dan terjadi bukan karena kehendak individu itu sendiri. Seseorang dapat dikategorikan miskin jika memiliki tingkat pendidikan rendah, penghasilan rendah, kesehatan dan gizi buruk serta kualitas kehidupan yang rendah menunjukkan siklus ketidakberdayaan.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pedoman dalam kerangka perundingan dan pembangunan antar negara di dunia mengganti pembangunan yang berakhir tahun 2015 ialah global *Millenium Development Goals* (UNDP & World Bank Group, 2016, Woodbridge, 2015) dalam (Nawir et al., 2022). Di Indonesia Implementasi SDGs global tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dituangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dibuatlah *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. SDGs Desa adalah pembangunan total terhadap Desa, mengacu pada 18 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa diantaranya Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Pendidikan desa berkualitas, Keterlibatan perempuan desa, Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa berenergi dan terbarukan, Pertumbuhan ekonomi desa merata, Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, Desa tanpa kesenjangan, Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, Desa tanggap perubahan iklim, Desa peduli lingkungan laut, Desa peduli lingkungan darat, Desa damai berkeadilan, Kemitraan untuk pembangunan desa, Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada tujuan 1 yaitu desa tanpa kemiskinan.

Kemiskinan di Desa Rancamulya masih menjadi persoalan penting untuk diketahui bagaimana pelaksanaan program SDGs di Desa Rancamulya dalam mengurangi kemiskinan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan, pemerintah merancang Program SDGs Desa tahun 2020. Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan melalui pengadaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai dengan harapan mampu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan temuan peneliti selama observasi lapangan dan wawancara bersama pihak terkait, ditemukan beberapa fenomena bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancamulya belum maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sumber daya finansial di Desa Rancamulya terdapat anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan riil di lapangan. Sumber daya manusia terdapat rendahnya kualitas staff sehingga kurangnya keahlian teknis untuk memasukan, memperbaiki dan memelihara data di sistem informasi desa. Sikap pelaksana tidak menunjukkan komitmen yang tinggi. Dalam struktur birokrasi adanya fragmentasi atau pembagian tugas yang tidak jelas dan menjadi salah satu hambatan meskipun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) telah tersusun.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi *Sustainable*

Development Goals (SDGs) Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam terhadap objek penelitian dengan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai fenomena dan fakta di lapangan terkait Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan instrumen teknis yang meliputi pedoman wawancara, foto, dokumen, handphone dan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Rancamulya, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping lokal Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi kebijakan dipandang secara luas, menjadi bagian dari proses sebuah kebijakan yang dilaksanakan setelah ditetapkannya undang-undang. Implementasi menurut Winarno (2007) adalah proses dimana undang-undang terlaksana, dimana adanya kerjasama antara aktor, organisasi, prosedur dan untuk menjalankan kebijakan demi mencapai program atau tujuan tertentu. Selain itu, implementasi dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang bisa dilihat sebagai proses, hasil atau dampak dari kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi *sustainable development goals (SDGs)* Desa, George Edward III mengidentifikasi empat variabel yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut akan menentukan efektivitas implementasi *sustainable development goals (SDGs)* Desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada sejauhmana pesan kebijakan disampaikan kepada implementor, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Komunikasi yang baik akan mengurangi kebingungan atau distorsi selama implementasi. Komunikasi merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menyampaikan informasi. Komunikasi tersebut adalah kejelasan dan transmisi dari informasi yang disampaikan. Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah pelaksana keputusan kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Maka komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dapat dimengerti.

a. Kejelasan

Kejelasan yang dimaksud Edward III dalam Agustino (2017) menghendaki suatu kebijakan ditransmisikan secara dan tidak membingungkan (tidak ambigu) terkait maksud, tujuan dan sasaran serta substansi kebijakan. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, peneliti menganalisis bahwa terkait sosialisasi tentang *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan di Desa Rancamulya ini dalam indikator kejelasan (komunikasi) belum terlaksana

dengan baik karena sosialisasi hanya dilakukan satu kali pada saat pertama kali *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa diluncurkan pada tahun 2020. Sehingga baik apatur desa, tokoh masyarakat maupun masyarakat desa kurang memahami terkait pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

b. Transmisi

Indikator transmisi menghendaki agar penyampaian sebuah kebijakan bukan hanya terbatas kepada pelaksana kebijakan, melainkan ditujukan juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lainnya yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menganalisis bahwa mengenai implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan indikator transmisi informasi di Desa Rancamulya belum efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya *miss communication* antar pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Sehingga perlu adanya suatu pemahaman tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa yang harus dipahami oleh semua pihak terutama bagi pelaksana. Karena komunikasi yang baik sangat penting agar bisa mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rancamulya belum maksimal, sehingga kejelasan dan transmisi dalam menjalankan SDGs Desa belum begitu tercapai. Sosialisasi hanya dilakukan satu kali pada tahun 2020, sehingga dalam hal ini masyarakat desa tidak peduli, tidak mengenal, dan tidak tahu pentingnya bagi desa dan kehidupan masyarakat.

2. Sumberdaya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah berkaitan dengan segala sumber yang dapat dipergunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Meski pesan kebijakan telah disampaikan dengan jelas, jika implementor tidak memiliki cukup sumber daya maka menyebabkan

implementasi tersebut kurang efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia.

a. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran (finansial) merupakan salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Karena dengan terbatasnya anggaran yang tersedia akan menghambat berjalannya proses implementasi kebijakan dan menjadi penyebab kualitas dari pelayanan pada masyarakat menjadi terbatas, karena kurangnya sumber daya anggaran akan membuat pelaksana kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menganalisis bahwa Sumber Daya Anggaran (Finansial) pada implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Rancamulya belum efektif. Adanya hal tersebut karena besaran anggaran dana desa yang tersedia berjumlah Rp. 1.225.619.800 pada tahun 2024 tidak mencukupi kebutuhan riil dilapangan, sehingga masyarakat penerima manfaat bantuan harus saling bergantian pada setiap periode agar bantuan tersebut bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi kebijakan, salah satu sumber daya yang penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM), karena untuk melaksanakan kebijakan perlunya sumber daya manusia yang memadai dan memahami terhadap dilakukannya implementasi kebijakan. Dengan demikian sumberdaya manusia meliputi dibutuhkan jumlah staff yang memadai dan keahlian yang dimiliki untuk menunjang keberhasilan dalam menjalankan implementasi kebijakan yang telah dirancang.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menganalisis bahwa mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Rancamulya belum berjalan secara optimal karena terdapat kualitas staff yang rendah sehingga karena dari sisi koordinasi ditemukan bahwa belum ada mekanisme teguran atau pemberitahuan kepada

penduduk pendatang baru mengenai kewajiban melaporkan kepindahan status kependudukannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi SDGs Desa di Desa Rancamulya terhambat oleh ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk memastikan implementasi SDGs Desa dapat dicapai adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan juga anggaran yang cukup.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) menjelaskan kondisi yang dimaksudkan dalam dimensi disposisi adalah kecenderungan perilaku atau karakteristik sikap dari pelaksana kebijakan. Faktor kemauan dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan akan membuka jalan pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan pembuat kebijakan.

a. Dedikasi

Dedikasi merupakan salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan menekankan bahwa sikap, komitmen, dan karakter pelaksana kebijakan harus memiliki dedikasi pada kepentingan publik bukan pada kepentingan pribadi agar sebuah implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

b. Kemampuan

Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan implementasi adalah kemampuan pelaksana untuk memahami tujuan, maksud dan aturan kebijakan dengan baik dan benar, sehingga tidak mengakibatkan penolakan atau kelambatan dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengidentifikasi bahwa dedikasi Pemerintah Desa Rancamulya sebagai pelaksana *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dapat dikatakan cukup baik karena dapat dilihat dari upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Desa Rancamulya, meskipun capaian desa tanpa kemiskinan belum tercapai optimal. Disisi lain, bentuk bantuan yang diberikan masih bersifat konsumtif dengan nilai yang terbatas, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara memadai.

Pola pemberian bantuan seperti itu justru menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, yang pada akhirnya tidak mendorong kemandirian ekonomi masyarakat penerima bantuan.

Kesimpulan dari dimensi disposisi ini adalah terdapat berbagai macam respon dari tingkat keterlibatan kelompok sasaran terhadap program dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa tanpa kemiskinan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur birokrasi mempunyai tugas mengimplementasikan kebijakan, memegang peran penting dalam proses penerapan tersebut. Panjangnya struktur organisasi akan menyebabkan lemahnya pengawasan dan menimbulkan *red tape* sehingga aktivitas organisasi kurang efektif.

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik jika adanya *standart operating procedur* (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Selain itu adanya fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pada beberapa unit kerja sesuai bidangnya masing-masing.

a. *Standart Operating Procedure* (SOP)

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) menjelaskan juga bahwa *Standart Operating Procedure* (SOP) juga dapat menjadi suatu hamatan bagi pelaksana kebijakan saat para pelaksana kebijakan membutuhkan cara-cara baru atau perubahan dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak terkait, peneliti menganalisis bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Rancamulya berjalan dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) namun problematis, karena hanya sebagian pihak di tingkat pemerintah desa yang mengklaim tahu tentang adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) dengan pemahaman yang sangat terbatas,

tidak detail dan tidak seragam. Mereka tidak bisa menjelaskan secara konkret apa isi *Standart Operating Procedure* (SOP) tersebut, bagaimana bentuknya dan bagaimana cara mengimplementasikannya.

b. Fragmentasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2002), fragmentasi diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab dalam suatu kebijakan. Dengan adanya penyebaran tanggung jawab tersebut, maka fungsi koordinasi sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, pembagian tugas dan tanggung jawab di antara pelaksana sudah dilakukan. Setiap pihak yang terlibat, baik aparatur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa maupun tokoh masyarakat, telah memiliki tugas dan perannya masing-masing yang berbeda-beda sesuai bidang dan kewenangannya. Secara struktural, pembagian tugas ini sebenarnya sudah cukup jelas. Tetapi, meskipun pembagian tugas ada, peneliti menemukan bahwa koordinasi antar pihak yang terlibat masih lemah dan perlu ditingkatkan secara signifikan.

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam dimensi struktur birokrasi berjalan tanpa mengetahui secara pasti tahapan SOP nya dan terkait pembagian tugas sudah terstruktur namun masih lemah dalam koordinasi antar pihak terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *sustainable development goals* (SDGs) Desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan di Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dapat disimpulkan bahwa implementasi *sustainable development goals* (SDGs) Desa sudah terimplementasikan namun belum bisa mewujudkan desa tanpa kemiskinan apabila ditinjau melalui empat dimensi implementasi kebijakan menurut George Edward III yaitu dimensi

komunikasi, dimensi sumberdaya, dimensi disposisi dan dimensi struktur birokrasi masih menemui beberapa hambatan diantaranya, dalam dimensi komunikasi masih kurang komunikasi terutama dalam dalam hal berkoordinasi dan sosialisasi. Dimensi sumberdaya, Masih rendahnya kualitas staf aparatur pemerintah desa membuat pendataan masyarakat belum sinkron dan masih kurang update serta jumlah dana anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan riil di lapangan. Dimensi disposisi, jaranganya turun ke lapangan sehingga jarang berinteraksi langsung di lapangan menyebabkan pengawasan dan pendampingan menjadi tidak maksimal. Dimensi Struktur Birokrasi, adanya ketidakpahaman para pelaksana terhadap *Standart Operating Procedure* (SOP) dan pembagian tugas yang sudah disebar tanpa adanya koordinasi yang baik antar pihak akan membuat ketidakefektivan terhadap implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Upaya dalam mengatasi hambatan diantaranya dengan melakukan sosialisasi rutin guna semua pihak memahami terkait adanya pembangunan berkelanjutan, melakukan pendataan secara berkala agar semua data masyarakat selalu *update*, melakukan peningkatan komitmen untuk memunculkan rasa peduli yang tinggi untuk pemerintah desa mau terjun langsung ke lapangan agar lebih mengetahui keadaan riil semua masyarakat di wilayahnya. Melakukan sinergi antar lembaga untuk menyeragamkan kepeahaman tentang *Standart Operating Procedure* (SOP) dan koordinasi yang kuat antara pemerintah desa dengan tokoh masyarakat agar pembagian tugas bisa efektif.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Affandi, H. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. L
- Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA, Gina Fitria. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–23.
- Basri, M., Ansyari, M. I., & Makassar, U. M. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Pilar*, 13(2), 200–214.
- Haris, A., Anas, A., Nurjaya, M., Iriawan, H., & Abdullah, M. T. (2024). Strategi

- dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 65–78.
- Kaedung, P. & U. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Mulyana, A., & Muslih, I. (2020). Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 14–24.
- Nawir, A., Syamsuddin, & Jusniaty. (2022). PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. *Demokrasi*, 1(3), 1–18.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Antasari Press.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2). PUSAKA ALMAIDA.
- Safudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Saputri, M. A., Millah, M. N., Falah, R. N., & Dewi, S. A. (2025). *Srategi Pengentasan Kemiskinan : Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan SDGs di Indonesia*.
- Sembiring, T., Ramadhani, K. N., Sembiring, G. P., Pancasila, P., & Ilmu, F. (2025). *Sinkronisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat di Desa Marindal II*.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103.
- Sruyanti, E. (2022). *IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA DI DESA YUNGYANG*. 409–416.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60.
- Suprianto, T. (2022). *Jurnal Bina Desa Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo Magelang Pendahuluan*. 4(3), 409–418.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36.
- Wahab, S. (2023). Persoalan Kemiskinan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6, 230–238.
- Wati, R. R., Basuki, P., & Suriadi, I. (2023). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 31–42.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3218.

BUKU

- Indrawati, S. M. (2020). Buku Pintar Dana Desa. *Proposal SIMLITAMAS*, 8–37.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Sarwono, A. E., & Handayani, A. (2021). Metode Kuantitatif. In *Metode Kuantitatif*.
- Solihin, D. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Media Pressindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa